



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang KodePos 50275
Tel. (024) 76918201 Faks. (024) 76918201
www.fh.undip.ac.id | email: fh[at]live.undip.ac.id

Nomor : 1800 /UN7.5.1.2.1/DL/2021
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Surat Pengantar Ujian Penulisan Hukum
Gelombang I Periode Februari 2021

18 FEB 2021

Yth. (daftar terlampir)
Tim Penguji Penulisan Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
Semarang

Berkenaan dengan Surat Edaran Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 20/UN7.P/SE/2020 serta upaya pencegahan penyebaran Virus Covid-19 dan telah ditetapkan sebagai bencana nasional, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan **ujian penulisan hukum dilaksanakan pada tanggal 22 dan 23 Februari 2021** secara daring via SSO (*Microsoft Teams*) dihadapan Tim Penguji Penulisan Hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara untuk bertindak sebagai penguji penulisan hukum sebagaimana daftar dan bahan ujian terlampir.

Setelah ujian dilaksanakan **para penguji dimohon untuk memberikan nilai dan pembimbing 1 selaku ketua penguji menyatakan lulus/tidak lulus melalui aplikasi SIAP.**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan Akademik & Kemahasiswaan

Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H.
NIDN 197208232000032001

DAFTAR PESERTA UJIAN PENULISAN HUKUM PERIODE BULAN FEBRUARI 2021
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

HARI, TGL : SENIN, 22 FEBRUARI 2021

No	NIM	Nama	Bidang Minat	Judul Skripsi	Pembimbing 1	Pembimbing 2	Penguji	Pukul
45	11000117130346	Satwika Anindya Sarathi Smara Putri	Hukum Tata Negara	Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.	Dr. Fifiانا Wisnaeni, M.Hum.	Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum	09.00
46	11000117120014	Ayu Savitri Nurcahyari	Hukum Tata Negara	Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam Pemindahan Pendidik Profesional Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Semarang	Dr. Fifiانا Wisnaeni, S.H., M.Hum	Indera, S.H., M.H.	Diasiana Anggia Ramadhan, S.H., LL.M.	10.00
47	11000117140405	Aulia Chandra Puspita	Hukum Tata Negara	KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN)	Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.	Sekar Anggun Gading Pinitih, S.H., M.H.	Dr. Lita Tyesta Addy Wardhani, S.H., M.Hum.	10.00
48	11000117120032	Nur Azizah Septiarni	Hukum Tata Negara	TINJAUAN YURIDIS MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI POSITIVE LEGISLATURE DALAM PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG	Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.	Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, S.H., M.Hum.	Dr. Fifiانا Wisnaeni, S.H., M.Hum.	11.00
49	11010115140303	Misbahuddin Muhammad	Hukum Tata Negara	Pelaksanaan Fungsi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Amiek Soemarni, S.H., M.Hum.	Sekar Anggun Gading P.S.H., M.H.	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.	09.00
50	11000117130187	SYARIFAH DESI PUTRIANI RAMADHANTY	Hukum Tata Negara	Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani S.H., M.Hum.	Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.	Amiek Soemarni, S.H., M.Hum.	12.30
51	11000117140418	YULLA ANDRIYANI	Hukum Tata Negara	PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERIODE 2019-2024 TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN JEPARA	Amiek Soemarni, S.H., M.Hum.	Dr. Fifiانا Wisnaeni, S.H., M.Hum.	Diasiana Anggia Ramadhan, S.H., LL.M.	13.30
52	11000117140452	DEMA LINTANG SUKOWATI	Hukum Tata Negara	FUNGSI DINAS KOPEKASI TERHADAP USAHA KECL. MENENGAH YANG TERDAMPAK COVID-19 DI PROVINSI JAWA TENGAH	Dr. Fifiانا Wisnaeni, S.H., M.Hum.	Amiek Soemarni, S.H., M.Hum.	Diasiana Anggia Ramadhan, S.H., LL.M.	14.30
53	11000117140435	Devi Yulida	Hukum Tata Negara	PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGIKUI KONSTITUSIONALITAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL MELALUI JUDICIAL PREVIEW	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.	Indera, S.H., M.H.	Amiek Soemarni, S.H., M.Hum.	11.00
54	11000117130168	SAGETA PURNANINGRUM	Hukum Tata Negara	PENGATURAN HAK POLITIK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA	Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.	Indera, S.H., M.H.	13.30

55	11000117130189	Nadia Ayu Febriani	Hukum Tata Negara	TUGAS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum	Sekar Anggun Gading P., S.H., M.H	Aprista Risyawati, S.H., M.H.	11.00
56	11000117120016	Asy Megakintani	Hukum Tata Negara	Hak memilih bagi disabilitas mental pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 133/PUU-XIII/2015	Prof.Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum	Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum	Indarya, S.H., M.H.	12.30
57	11000117130210	AGHINIA MAURIZKA PRAMESWARI	Hukum Tata Negara	IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 TENTANG PEMILIHAN UMUM	Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.	Ibu Sekar Anggun Gading P., S.H., M.H	Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum	13.00
58	11000117130353	Andre Oktania Tarigan	Hukum Tata Negara	Pencegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Dalam Upaya Pencegahan Persebaran Corona Virus Disease 2019	Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum	Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H.	Untung Sri Hardjano, S.H., M.Hum	14.30

DAFTAR PESERTA UJIAN PENULISAN HUKUM PERIODE BULAN FEBRUARI 2021
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

HARI, TGL : SELASA, 23 FEBRUARI 2021

No	NIM	Nama	Bidang Minat	Judul Skripsi	Pembimbing 1	Pembimbing 2	Penguji	Pukul
59	11000117140402	Hanganararas Pandhita	Hukum Tata Negara	Sistem Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak di Negara Indonesia	Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum	Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum	Indarja, S.H., M.H.	09.00
60	11000117120021	Alfina Damayanti Haryanto	Hukum Tata Negara	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-LV/2006 Terhadap Pengawasan Hakim	Dr. Fifiiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.	Sekar Anggun Gading Pinitih, S.H., M.H.	Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, S.H., M.Hum.	13.30
61	11000117140458	NERISSA ARYANALATIFA	Hukum Tata Negara	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESIRIR BALOMULYO JUWANA OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN	Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.	Indarja, S.H., M.H.	09.00
62	11000117140488	Yasinta Dyah Paramitha Hapsari	Hukum Tata Negara	Pemberian Bantuan dan Pemberdayaan Fakir Miskin di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.	Aprista Risyawati, S.H., M.H.	Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, S.H., M.Hum.	10.00
63	11000117140414	Muhammad Adhar Adhyany	Hukum Tata Negara	PENINJAUAN KEMBALI (JUDICIAL REVIEW) OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERATURAN DAERAH	Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.	Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, S.H., M.Hum.	14.30
64	11000117130330	Vania Angelica Corputy	Hukum Tata Negara	Komis Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai State Auxiliary Bodies dalam Penegakan Hak Asasi Anak sesuai dengan Amanat Konstitusi dan Undang-Undang Perlindungan Anak	Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum.	Aprista Risyawati, S.H., M.H.	Dr. Fifiiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.	11.00
65	11000117130245	Rezky Mahendra Putra	Hukum Tata Negara	FUNGSI KEPALA DESA DALAM PENYALURAN DANA DESA UNTUK PENANGGULANGAN COVID 19 DI DESA SUMOWONO KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG	Dr. Lita Tyesta Adi Listiya Wardhani, SH., M.Hum	Untung Sri Hardjanto, S.H., M.Hum	Dr. Fifiiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.	12.30
66	11000117130211	Nabila Yuarizki Ulima	Hukum Tata Negara	TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 P/HUM/2020	Indarja, S.H., M.H	Sekar Anggun Gading P., S.H., M.H	Aprista Risyawati, S.H., M.H.	12.30
67	11000117130186	Noviana Nor Rahmawati	Hukum Tata Negara	Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Oleh Satuan Tugas Di Provinsi Jawa Tengah	Indarja, S.H., M.H	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.	Diaslana Anggia Ramadhan, S.H., LL.M	11.00
68	11000114140492	Dhania Primitha Adhi Suprobo	Hukum Tata Negara	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Semarang Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Untung Sri Hardjanto, S.H., M.Hum.	Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum.	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H	12.30